

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hal ini mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik (Ulum, 2004 dalam As Syifa Nurillah, 2014).

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena: a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan c) terdapat pemisahan antara manajemen pemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000 dalam Nurillah, 2014). Saat ini secara bertahap pemerintah mulai menerapkan *accrual basic* sebagai basis akuntansi yang harus diterapkan dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah. Penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi, pilihan akuntansi dan menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi (dapat diandalkan).

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada

DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan pernyataan menolak memberikan Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Begitu juga dengan entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada didalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan *karier* mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas

karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasanya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah. (Nurillah, 2014).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meliputi Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan unit lainnya.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan

kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Tabel 1.1  
Perkembangan opini LKPD pada tahun 2011 sampai 2015

LKPD (Tahun)	WTP	WDP	TW	TMP
2011	13%	67%	19%	1%
2012	23%	61%	16%	1%
2013	30%	59%	9%	2%
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	36%	5%	1%

Sumber : IHPS II Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 Meskipun presentase WTP meningkat dari tahun ke tahun, tetapi hali ini masih jauh dari harapan. Fenomena tersebut bisa saja terjadi karena ketidakefisienan penggunaan anggaran, penyimpangan administrasi dan masih lemahnya system pengendalian intern (Yosefrinaldi, 2008).

Tabel 1.2  
Perkembangan Opini Kabupaten Bondowoso pada tahun 2011 sampai 2015

Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016
Kabupaten Bondowoso	WTP DPP	WTP DPP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP

Sumber : IHPS II Tahun 2016

Berdasarkan perkembangan opini kabupaten bondowoso pada tahun 2011 sampai tahun 2015 yaitu terjadinya peningkatan dari setiap tahunnya. Mengingat karakteristik kualitatif merupakan unsur terpenting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik

untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Terjadinya peningkatan presentase Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam perkembangan opini LKPD.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Bagaimana meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.4 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.5 Tujuan**

1. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

## **1.6 Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan

keuangan pemerintah daerah dan hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia untuk masa mendatang dan untuk memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD serta dapat menyumbangkan saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.